

**DE-AMALGAMASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH:
Potensi Pemekaran Wilayah Kabupaten Bogor
di Era Moratorium**

Zeafa Abdul Rozaaq

NPP. 32.0150

Asdaf Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
Politik Indonesia Terapan

Email: zeafaar251001@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Fadhli Zul Fauzi, M.PA

ABSTRACT

Problem/Background(GAP):): The author focuses on the readiness of the East Bogor Preparatory Region Candidate in regional expansion and the role of political elites in regional expansion in Bogor Regency. **Purpose:** The purpose of this study is to determine and describe the readiness of East Bogor Regional Candidates in Regional Expansion in the Moratorium Era.. **Method:** This research uses qualitative methods and data collection techniques carried out with 7 informants as well as researcher observation in the field and documentation.. **Result:** The findings obtained by researchers in this study are that the readiness carried out by Bogor Regency in regional expansion in Bogor Regency is quite good. This can be seen from the readiness of Prospective Preparatory Regions starting from the Location of the Capital City, Agency / Institution Structure, division of tasks, ASN Resources, Community support for expansion, feasibility of Prospective Preparatory Regions in terms of Financial, Economic, Community, and Environment, estimated costs incurred and allocation of funds as a result of expansion and conflicts that will occur if expansion occurs. The role of political actors in the expansion process plays an important role in the creation or realization of expansion. This can be proven by the bold steps taken by the political elite who initiated to consolidate and discuss with the Bogor Regency Government related to the wishes of the people of East Bogor related to regional expansion and make East Bogor as East Bogor Regency. **Conclusion:** DE-AMALGAMATION AND LOCAL GOVERNMENT: The Potential for Regional Expansion of Bogor Regency in the Moratorium Era using the theory (Dollery et al., 2011) which has 5 dimensions is in accordance with the conditions in the field and the Preparatory Region Candidates can be said to be feasible for expansion and the support of political elites is very good but still constrained by the moratorium.

Keywords: De-amalgamation, Regional Expansion, Local Government, East Bogor, Moratorium

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penulis berfokus pada kesiapan Calon Daerah Persiapan Bogor Timur dalam pemekaran wilayah di era moratorium dan peran elit politik dalam pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor di era moratorium. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kesiapan Calon Daerah Bogor Timur dalam Pemekaran Wilayah di Era Moratorium. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tehnik pengumpulan data dilakukan bersama 7 informan serta observasi peneliti di lapangan dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kesiapan yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor dalam pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan Calon Daerah Persiapan mulai dari Lokasi Ibu kota, Struktur Badan/Lembaga, pembagian tugas, Sumber Daya ASN, Dukungan masyarakat terhadap pemekaran, kelayakan dari Calon daerah persiapan dari segi Finansial, Ekonomi, Masyarakat, dan Lingkungan, perkiraan pembiayaan yang ditimbulkan dan alokasi dana akibat dari pemekaran serta konflik yang akan terjadi apabila pemekaran terjadi. Peran aktor politik dalam proses pemekaran memegang peran penting dalam terciptanya atau terwujudnya pemekaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya langkah yang berani yang dilakukan oleh elit politik yang menggagas untuk melakukan konsolidasi dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait dengan keinginan masyarakat Bogor Timur terkait dengan pemekaran wilayah dan menjadikan Bogor Timur sebagai Kabupaten Bogor Timur. **Kesimpulan:** DE-AMALGAMASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH: Potensi Pemekaran Wilayah Kabupaten Bogor di Era Moratorium dengan menggunakan teori (Dollery et al., 2011) yang memiliki 5 dimensi sudah sesuai dengan kondisi di lapangan dan Calon Daerah Persiapan dapat dikatakan layak untuk dimekarkan dan dukungan elit politik yang sangat baik namun masih terkendala dengan moratorium. **Kata kunci:** De-amalgamasi, Pemekaran Wilayah, Pemerintahan Daerah, Bogor Timur, Moratorium

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika ketatanegaraan Indonesia turut mempengaruhi tata kelola pemerintahan (Thahir, 2019). Salah satunya ialah Fenomena pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran daerah di Indonesia yang menjadi fenomena yang menarik. Terlebih setelah diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang bagi pembentukan daerah otonom baru baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Undang-undang ini merupakan titik awal dari pembentukan atau pemekaran daerah otonom baru yang dilakukan secara masif (Nurhasanah et al., 2018). Tidak banyak negara yang mengalami pertumbuhan jumlah pemerintah daerah secepat Indonesia saat ini (Firman, 2013). Saat ini menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 menyatakan, jumlah kabupaten di Indonesia mencapai 416 kabupaten, setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Yonathan, 2024). Pemekaran daerah masih menjadi isu utama perdebatan di forum kebijakan publik Indonesia. Tingkat persetujuan administratif dan modal sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah peristiwa pemekaran daerah. Transfer fiskal dan pendapatan yang selama ini menjadi stigma yang menggambarkan alasan suatu daerah ingin dimekarkan. Namun pada kenyataannya, transfer fiskal dan pendapatan tidak menjadi motif bagi daerah-daerah di Indonesia untuk melakukan pemekaran (Digidowiseiso et al., 2022). Pemekaran wilayah merupakan salah satu wujud dari desentralisasi di Indonesia yang mencakup pemetaan ulang secara signifikan terhadap geografi politik dan administrasi melalui pembentukan unit administratif baru (Keith Andrew Bettinger, 2014).

Pemekaran daerah dalam arti pembentukan kabupaten dan kota, seharusnya juga diperuntukkan guna mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan memberikan dampak terhadap meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mereformasi jalur birokrasi, memperpendek rentang kendali, juga memberikan ruang terbukanya daerah-daerah isolasi yang terpencil (susanti, 2014). Salah satu komponen penting dalam keuangan daerah ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi sebagai sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah dan retribusi (Marlina, 2019). Peningkatan PAD berhubungan langsung dengan kemampuan daerah untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik (Yudia et al., 2024). Dalam hal ini pada kasus di Kabupaten Bogor memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Berikut tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor dari tahun 2020-2023:

Tabel 1. 1

Sumber Pendapatan	Tahun (dalam Milyar)			
	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	7.687,18	9.124,62	9.029,61	9.739,56
PAD	2.810,16	3.761,91	3.682,56	3.968,03
Pajak Daerah	1.857,41	2.455,98	2.595,24	2.805,98
Retribusi	128,92	126,42	93,89	125,78
Hasil Pengelolaan Kekataan Daerah yang Dipisahkan	67,10	71,30	75,86	76,24
Lain-lain PAD yang Sah	756,73	1.108,21	917,57	960,03
TKDD	3.400,05	3.663,87	4.169,51	4.501,68
Pendapatan Lainnya	1.476,97	1.698,84	1.177,54	1.269,85

Dengan potensi dari segi finansial yang dimiliki seperti yang dipaparkan di atas. Potensi tersebut bersumber dari beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bogor. Salah satunya ialah bogor wilayah timur sebagai penyumbang PAD yang cukup besar serta banyak potensi yang dapat dimaksimalkan apabila pemekaran bogor timur ini benar terjadi. Dilansir dalam Tribunnewsbogor.com (2023) bahwa Pendapatan Asli Daerah Bogor Timur sudah mencapai 700 miliar pada tahun 2022.

Berikut persentase penyumbang Pendapatan Asli Daerah dari masing-masing kecamatan Calon Daerah Persiapan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor:

Tabel 2.2

NO.	Kecamatan	Persentase	Keterangan
1	Gunung Putri	22,79%	Sektor Industri Pengolahan
2	Klapanunggal	6,58%	Sektor Industri Pengolahan
3	Cileungsi	15,49%	Sektor Industri Pengolahan
4	Jonggol	0,90%	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
5	Cariu	0,37%	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
6	Tanjungsari	0,35%	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
7	Sukamakmur	0,26%	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Berdasarkan tabel di atas Potensi tertinggi terdapat pada sektor industri pengolahan berada pada Kecamatan Gunung Putri mencapai 22,79% penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor, serta yang terendah terdapat pada sektor pertanian,kehutanan dan perikanan yaitu Kecamatan Sukamakmur sebesar 0, 26% terhadap Pendapatan Asli Daerah Aspek kewilayahan merupakan aspek yang perlu di penuhi untuk melakukan pemekaran suatu wilayah hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 35 ayat (4) huruf b bahwa untuk melakukan pemekaran wilayah memerlukan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk membentuk daerah kabupaten. Calon Daerah Persiapan Bogor Timur terdiri atas 7 Kecamatan dan 75 Desa.

Berdasarkan potensi di atas masyarakat mendesak pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan pemekaran. Terdapat 3 alasan mendasar masyarakat ingin bogor timur menjadi daerah pemekaran. Pertama, terkait dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Kedua, faktor pertumbuhan penduduk yang makin hari semakin banyak penduduk yang bertambah Ketiga, jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan, sehingga menghambat proses pelayanan publik. Masyarakat harus menempuh jarak kurang lebih 71 KM dari kecamatan paling timur yang berada di timur Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Tanjungsari dan harus menempuh 2-3 jam perjalanan untuk ke daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk melakukan pengurusan berkas administrasi. Dalam perjalanannya pemekaran wilayah memiliki tantangan yaitu mulai dari harus adanya persetujuan dari kepala daerah yang daerahnya ingin dilakukan pembentukan daerah baru, DPRD tidak menyetujui untuk dilakukannya pemekaran, serta adanya kebijakan moratorium. Kebijakan moratorium ialah kebijakan terhadap penangguhan pemekaran wilayah dengan pola seleksi terhadap potensi daerah yang ingin dilakukan pemekaran yang ada sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2006 kecuali Provinsi Papua (Humas Sekretaris Kabinet, 2019).

Namun dalam kasus pemekaran wilayah di Bogor Timur ini memiliki potensi terwujudnya pemekaran di wilayah ini. Hal ini dikarenakan pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat yaitu Presiden Prabowo Subianto yang merupakan salah satu warga dari Kabupaten Bogor. Dilansir dalam CNN Indonesia (2024) periode pemerintahan Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi realisasi pembentukan DOB di Kabupaten Bogor. Beliau memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Bogor untuk melakukan pemekaran wilayah khususnya Bogor Timur hal ini diungkapkan oleh mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor

yaitu Bapak Rudy Susmanto yang sekarang sedang berkontestasi politik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bogor periode 2024-2029. Beliau juga mendukung pemekaran Kabupaten Bogor menjadi beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) salah satunya yaitu Bogor Timur. Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DE-AMALGAMASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH: Potensi Pemekaran Wilayah Kabupaten Bogor di Era Moratorium”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis berfokus pada Calon Daerah Persiapan yang memiliki potensi sangat besar dan membawa harapan masyarakat Bogor Timur yang menginginkan pemekaran dikarenakan beberapa alasan antara lain yaitu pelayanan publik kurang optimal, pembangunan yang belum merata, serta potensi daerah yang sangat besar.

Permasalahan yang kedua ialah adanya kebijakan moratorium yang ditetapkan oleh Presiden ke-6 yang diakibatkan oleh maraknya pemekaran daerah pada saat itu. Sejalan dengan hal tersebut perlunya aktor politik berperan untuk melakukan *manuver* politik agar pemekaran ini dapat direalisasikan. Pada permasalahan di Kabupaten Bogor yang melakukan *manuver* politik di Calon Daerah Persiapan Bogor Timur hanya satu orang. Hal ini yang membuat lambannya proses dari pemekaran yang ada di Kabupaten Bogor.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang pernah ditulis dalam karya ilmiah sebagai bahan pedoman dan bahan pembanding dari peneliti. Pada penelitian pertama yang diteliti oleh (Hamri et al., 2016) berjudul *Kebijakan Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya* menemukan bahwa analisis yang dilakukan terhadap Kota Tasikmalaya yang dilakukan pemekaran berkembang dengan cepat dari segi ekonomi. Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh (Akbar, 2018) berjudul *Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah* menemukan bahwa dalam pemekaran wilayah memiliki dampak positif dan dampak negative, serta perlu adanya kajian mendalam terkait suatu daerah yang akan dimekarkan. Penelitian selanjutnya penelitian yang diteliti oleh (Marfu'ah, 2017) yang berjudul *Pemekaran Wilayah Ogan Komering Hulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan* menemukan bahwa pemekaran wilayah memberikan kemudahan namun terdapat hal yang negatif pada system pemerintahannya yaitu adanya politik dinasti pada daerah tersebut yaitu wilayah Ogan Komering Hulu Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian selanjutnya penelitian yang diteliti oleh (Nurhasanah et al., 2018) yang berjudul *Analisis Kelayakan Dan Strategi Pengembangan Wilayah Dalam Wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru Bogor Timur* menemukan bahwa hasil analisis kelayakan teknis dan fisik Bogor Timur untuk menjadi sebuah daerah otonom, akan tetapi syarat administrasi belum terpenuhi. Dan penelitian yang terakhir penelitian yang diteliti (Sinen et al., 2022) yang berjudul *Strategi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat* menemukan bahwa pemekaran di wilayah Papua Barat merupakan bentuk usaha dari pemerintah dan masyarakat dalam melakukan percepatan pembangunan di wilayah papua serta memberikan kesempatan anak-anak papua atau Orang Asli Papua (OAP) untuk menjalankan pemerintahan dan mendapatkan kehidupan yang layak.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Meskipun, kajian mengenai pemekaran daerah telah banyak dilakukan, sebagian besar studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kelayakan administratif, teknis, dan ekonomi sebelum diterapkannya kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Penelitian-penelitian tersebut juga cenderung belum secara menyeluruh menggunakan pendekatan de-amalgamasi menurut (Dollery et al., 2011) yang mempertimbangkan lima aspek utama: desain kelembagaan, dukungan masyarakat, kelayakan wilayah baru, efisiensi biaya, serta potensi konflik. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam kajian yang mengeksplorasi bagaimana aktor-aktor politik lokal membangun narasi dan strategi advokasi di tengah pembatasan kebijakan dari pemerintah pusat. Minimnya penggunaan teori de-amalgamasi dalam konteks Indonesia juga menunjukkan kurangnya literatur yang dapat menjelaskan secara komprehensif dinamika pemekaran di daerah dengan karakteristik demografis dan geografis yang kompleks seperti Bogor Timur. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis potensi pemekaran wilayah Kabupaten Bogor di era moratorium melalui pendekatan teori de-amalgamasi serta memetakan dukungan aktor-aktor politik lokal dalam mendorong realisasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kesiapan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pemekaran Wilayah di Era Moratorium dan mengetahui dukungan politik elit politik dalam Pemekaran Wilayah di Kabupaten Bogor.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang fleksibel atau dapat dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Simangunsong, 2016). Metode kualitatif digunakan untuk memahami makna di balik fakta sosial, dengan menekankan pada kedalaman analisis terhadap fenomena yang kompleks dan kontekstual (Nurdin, 2019). Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti terlibat langsung sebagai instrumen utama dalam menginterpretasi makna yang muncul dari interaksi sosial di lapangan. Menurut (Sugiyono, 2013), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung aktivitas atau situasi yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber. Sementara dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari arsip, catatan, atau dokumen pendukung lainnya. Penelitian ini menggunakan 7 Informan dengan 2 Informan kunci yaitu Ketua Tim Pemekaran untuk melihat kesiapan pemerintah dalam pemekaran wilayah Bogor Timur dan Ketua Presidium Bogor Timur untuk melihat realitas politik yang ada pada proses pemekaran. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6- 25 Januari 2025 di Kabupaten Bogor.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pemekaran Wilayah di Era Moratorium dengan menggunakan teori De-amalgamasi menurut (Dollery et al., 2011) yang menyatakan De-amalgamasi memiliki 5 dimensi, yakni: perancangan badan-badan pemisahan, dukungan masyarakat, kelayakan dari calon daerah baru, biaya transaksi dan biaya transformasi, dan sumber-sumber konflik.

3.1 Perencanaan Badan-Badan Pemisahan

Dalam proses pemekaran wilayah harus mempertimbangkan tiga indikator utama sesuai dengan Teori De-Amalgamasi (Dollery et al., 2011), yakni-ketersediaan sumber daya aparatur, kelengkapan kelembagaan, dan realitas politik. Dalam studi kasus Daerah Persiapan Bogor Timur, ketersediaan sumber daya aparatur dinilai telah mencukupi berdasarkan proyeksi ASN yang dibutuhkan dan data aktual yang menunjukkan terdapat 3.802 ASN di wilayah tersebut. Realitas politik juga mendukung pemekaran ini karena berasal dari aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui DPRD, mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik semata.

Namun, masih terdapat kendala signifikan dalam aspek kelengkapan kelembagaan, khususnya terkait kesiapan lokasi ibukota pemerintahan. Permasalahan utamanya adalah kurangnya lahan milik pemerintah serta risiko bencana di Kecamatan Jonggol yang direncanakan sebagai calon ibukota. Meski struktur organisasi perangkat daerah telah dirancang dengan pembagian 29 OPD dan 7 kecamatan, serta proyeksi kebutuhan pegawai telah ditentukan, kendala fisik terkait lahan tetap menjadi hambatan utama yang memerlukan pendekatan lebih lanjut dari pemerintah daerah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

Dukungan politik terhadap pemekaran Bogor Timur diperkuat oleh pernyataan para tokoh seperti anggota DPRD dan Ketua Presidium yang menegaskan bahwa pemekaran ini merupakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Kolaborasi antara masyarakat dan aktor politik lokal menunjukkan realitas politik yang mendukung pemekaran. Berdasarkan analisis dan data yang dihimpun, dapat disimpulkan bahwa kondisi Daerah Persiapan Bogor Timur telah memenuhi sebagian besar indikator dalam teori De-Amalgamasi, meskipun masih ada tantangan yang perlu ditangani terutama dalam aspek infrastruktur fisik dan penetapan lokasi ibukota yang ideal.

3.2 Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat terhadap pemekaran Bogor Timur sangat kuat dan menjadi faktor penting dalam proses ini. Masyarakat, melalui Presidium Bogor Timur dan DPRD, menyampaikan aspirasi yang didasari oleh kebutuhan pelayanan publik yang lebih dekat dan merata. Hal ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah sebagai bentuk respons terhadap keluhan warga. Ketua Presidium Bogor Timur menegaskan bahwa pemekaran merupakan tuntutan bersama masyarakat yang disepakati dalam rapat dengan perwakilan desa. Harapan utama masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan melalui percepatan pembangunan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar.

Secara keseluruhan, tidak ada penolakan dari masyarakat, dan aspirasi mereka telah disampaikan secara formal melalui surat resmi ke pemerintah. Temuan ini menunjukkan kesesuaian dengan teori yang digunakan, bahwa dukungan dan partisipasi masyarakat adalah kunci dalam keberhasilan pemekaran wilayah

3.3 Kelayakan Dari Calon Daerah Baru

Kelayakan Calon Daerah Persiapan (CDP) Bogor Timur dinilai berdasarkan empat pilar keberlanjutan: finansial, ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keberlanjutan ekonomi, masyarakat, dan finansial. Secara ekonomi, CDP Bogor Timur menunjukkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,04% yang lebih tinggi dari rata-rata nasional wilayah pulau dan kepulauan (3,12%). Namun, masih terdapat tantangan seperti pendapatan per kapita yang rendah (Rp9,6 juta dibanding rata-rata nasional Rp14,1 juta) serta tingginya angka kemiskinan (42,76% dibanding 10,31%). Tiga kecamatan terluar (Cariu, Tanjungsari, Sukamakmur) menjadi wilayah dengan kondisi sosial ekonomi yang paling tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) CDP Bogor Timur berada pada angka 68,17, sedikit di bawah rata-rata nasional 73,02, namun masih dalam kategori cukup baik.

Dari aspek keberlanjutan masyarakat, fasilitas pendidikan cukup tersebar dengan 813 unit sekolah, namun fasilitas kesehatan belum merata dan cenderung terpusat di wilayah tertentu. Hanya tiga kecamatan yang memiliki rumah sakit, dan jumlah tenaga medis sangat timpang, terutama di wilayah timur. Selain itu, fasilitas layanan publik seperti pemadam kebakaran dan UPTD Kependudukan masih sangat terbatas. Pemekaran diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah yang selama ini kurang tersentuh.

Dari sisi keberlanjutan finansial, CDP Bogor Timur dinilai cukup mampu secara fiskal. Wilayah ini merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi kedua setelah wilayah tengah Kabupaten Bogor. Hal ini didukung oleh besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) khususnya pada sektor industri dan pertanian. Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa meskipun masih ada kekurangan, khususnya dalam indikator kemiskinan dan pendapatan per kapita, CDP Bogor Timur memiliki potensi dan kapasitas yang cukup untuk berkembang menjadi daerah otonom baru dengan syarat dilakukan intervensi pembangunan yang tepat sasaran.

3.4 Biaya Transaksi Dan Biaya Transformasi

Teori De-Amalgamasi (Dollery et al., 2011) menekankan pentingnya meminimalkan biaya transaksi dan biaya transformasi dalam proses pemekaran wilayah, serta kejelasan aliran dana ke daerah persiapan. Dalam konteks Calon Daerah Persiapan (CDP) Bogor Timur, pembiayaan akibat pemekaran dinilai relatif kecil karena sebagian besar aset Pemerintah Kabupaten Bogor sudah berada di wilayah CDP. Oleh karena itu, CDP hanya perlu membangun kantor pusat pemerintahan. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, seperti Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah, diketahui bahwa biaya transformasi yang timbul hanya mencakup operasional awal seperti sewa gedung, pembelian kendaraan dinas, dan sarana prasarana, yang disubsidi selama tiga tahun oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Dana yang dialokasikan sebesar 20 miliar rupiah dalam jangka waktu tiga tahun juga digunakan untuk pengadaan fasilitas, dengan pelimpahan aset dari kabupaten ke CDP. Keseluruhan pembiayaan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah induk, sesuai dengan poin ke-5 dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan adanya relevansi antara teori De-Amalgamasi dan kondisi empiris di lapangan.

3.5 Sumber-Sumber Konflik

Pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor, khususnya di Bogor Timur, tidak menimbulkan konflik karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat. Menurut Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Muhammad Lutfi, hingga kini belum ditemukan konflik terkait pemekaran wilayah tersebut. Jika muncul masalah, pihak terkait siap menanganinya. Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menunjukkan bahwa jumlah konflik sosial di Bogor Timur lebih rendah dibanding Bogor Barat, dan konflik yang ada tidak terkait dengan pemekaran wilayah. Dengan demikian, proses pemekaran di Bogor Timur berjalan lancar tanpa menimbulkan gesekan sosial.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam kasus pemekaran wilayah di Bogor Timur sepenuhnya berasal dari keinginan masyarakat guna memenuhi tujuan dari penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemekaran wilayah ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat maupun negara. Pemekaran wilayah di Bogor Timur berdasarkan realitas politik yang ada, pemekaran yang dilakukan merupakan sepenuhnya keinginan masyarakat tanpa adanya kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan penelitian (Akbar, 2018) dalam pemekaran wilayah selayaknya berasal dari keinginan masyarakat guna mencapai tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Calon Daerah Persiapan Bogor Timur layak dari segi kemampuan ekonomi hal ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat selama 5 tahun terakhir pada Calon Daerah Persiapan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhasanah et al., 2018) yang menunjukkan bahwa kesiapan Bogor Timur secara umum dari segi ekonomi dan fiskal dapat dikatakan layak untuk sebuah kabupaten baru.

Kesiapan dari Calon Daerah pemekaran Bogor Timur sudah cukup baik, namun ada kendala yang terdapat pada kekurangannya lahan yang dibutuhkan untuk Calon Daerah Ibukota serta Penentuan Lokasi Ibukota yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana menurut BPBD Kabupaten Bogor. hal ini berbeda dengan penelitian (Nurhasanah et al., 2018) yang hanya membahas kelayakan dari segi finansial dan ekonomi serta strategi pengembangan wilayah saja. Pada penelitian ini peneliti membahas terkait dengan kesiapan dari Calon Daerah Persiapan mulai dari kesiapan badan-badan pemisahan yang mencakup kesiapan Sumber Daya ASN, kesiapan kelengkapan kelembagaan, serta realitas politik yang ada. Penelitian ini juga melihat sejauh mana dukungan masyarakat terhadap pemekaran. Masyarakat mendukung sepenuhnya pemekaran ini hal ini dapat dibuktikan dengan surat keputusan Musyawarah Desa sebanyak 58 Desa dan 7 Kecamatan yang menyatakan setuju terhadap pemekaran yang akan dilakukan. Penelitian ini juga melihat kelayakan dari Calon Daerah Persiapan yang akan dimekarkan meliputi kelayakan finansial, kelayakan ekonomi, kelayakan masyarakat, kelayakan lingkungan, serta penelitian ini juga membahas terkait dengan pembiayaan yang diakibatkan dari pemekaran ini dan konflik yang dapat terjadi akibat dari pemekaran ini. Penelitian ini juga melihat peran elit politik yang mendukung pemekaran sehingga menjadi pembahasan pada rapat pimpinan daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai de-amalgamasi dan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor di era moratorium, dapat disimpulkan bahwa kesiapan pemerintah Kabupaten Bogor dalam menghadapi rencana pemekaran wilayah, khususnya pembentukan Calon Daerah Persiapan Bogor Timur, sudah cukup baik. Hal ini tercermin dari kesiapan dalam berbagai aspek penting, seperti penentuan lokasi ibu kota, pembentukan struktur kelembagaan dan pembagian tugas, serta ketersediaan sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang mencukupi. Selain itu, dukungan

masyarakat terhadap rencana pemekaran juga sangat kuat, yang menjadi salah satu faktor penting dalam kelayakan pembentukan daerah baru.

Dari segi kelayakan, Calon Daerah Persiapan Bogor Timur telah memenuhi aspek finansial, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perkiraan pembiayaan yang akan muncul akibat pemekaran juga sudah diperhitungkan dengan matang, di mana sebagian besar kebutuhan awal akan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk melalui pelimpahan aset yang sudah berada di wilayah calon daerah persiapan. Potensi konflik sosial yang biasanya menjadi tantangan dalam pemekaran juga relatif kecil, bahkan hingga saat ini belum ditemukan konflik yang berarti karena dukungan masyarakat sangat solid.

Selain faktor kesiapan teknis dan sosial, peran aktor politik menjadi kunci penting dalam mendorong terwujudnya pemekaran wilayah. Aktor politik berperan aktif dalam melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah, menyuarakan aspirasi masyarakat Bogor Timur, serta mendorong penyusunan dan pengesahan regulasi di tingkat nasional sebagai dasar hukum teknis pemekaran wilayah. Tanpa keterlibatan dan dorongan dari aktor politik ini, proses pemekaran tidak akan berjalan efektif, terutama di tengah kebijakan moratorium yang masih berlaku secara nasional.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu *updating* data yang ada hanya data pada tahun 2023.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa adanya keterbatasan akan temuan yang peneliti lakukan. Maka dari itu, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai hal-hal yang sudah menjadi temuan peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu kontribusi kepada daerah yang akan dimekarkan dengan melihat kesiapan dari calon daerah dan peran elit politik yang mendukung pemekaran sehingga menjadi pembahasan pada rapat pimpinan daerah.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada bapak H. Beben selaku anggota DPRD kabupaten bogor, Bapak Alhafiz Rana selaku ketua presidium Kabupaten Bogor, Bapak Arif Rahman Suhandi, S.IP, M.M selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di BAPPEDA Kabupaten Bogor, Bapak Endri Hidayat, S.STP selaku Ketua Tim Pemekaran Wilayah, Bapak Muhammad Lutfi, S.STP, M.A selaku Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2018). *Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. 3(1), 1–15.
- Digdowniseiso, K., Murshed, S. M., & Bergh, S. I. (2022). What Drives Regional Proliferation in Indonesia? Assessing the Role of Institutions. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 20(1), 27–54. [https://doi.org/10.4335/20.1.27-54\(2022\)](https://doi.org/10.4335/20.1.27-54(2022))
- Dollery, B., Kortt, M., & Grant, B. (2011). A Normative Model for Local Government De-Amalgamation in Australia. *Australian Journal of Political Science*, 46(4), 601–615. <https://doi.org/10.1080/10361146.2011.623670>
- Fauzy, N. (2023). *PAD Hampir Rp 700 M, Achmad Ruyat Sebut Usulan DOB Bogor Timur dan Bogor Barat Paling Top*. *Tribunnewsbogor.Com*. <https://bogor.tribunnews.com/2023/09/19/pad-hampir-rp-700-m-achmad-ruyat-sebut-usulan-dob-bogor-timur-dan-bogor-barat-paling-top>
- Firman, T. (2013). Territorial Splits (Pemekaran Daerah) in Decentralising Indonesia, 2000–2012: Local Development Drivers or Hindrance? *Space and Polity*, 17(2), 180–196. <https://doi.org/10.1080/13562576.2013.820373>

- Hamri, E., Intan, E., Putri, K., Siregar, H. J., Bratakusumah, D. S., No, J. I., Puunaaha, K., Unaaha, K., Konawe, K., & Belakang, A. L. (2016). (Regional Autonomy Policy and mendorong kuatnya arus tuntutan daerah-daerah krisis moneter tahun 1998 mengubah Indonesia dari satu negara paling demokratis dan terdesentralisasi sebagai salah satu bentuk pengembangan wilayah sehingga diharapkan dapat mem. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Kebijakan Publik*, 7, 111–125.
- Humas Sekretaris Kabinet. (2019). *Usulan 314 DOB Dikaji, Mendagri: Pemerintah Tetap Berlakukannya Moratorium Pemekaran Daerah*. <https://setkab.go.id/usulan-314-dob-dikaji-mendagri-pemerintah-tetap-berlakukannya-moratorium-pemekaran-daerah/>
- Indonesia, C. (2024). *Ketua DPRD Optimistis Prabowo Wujudkan Pemekaran Kabupaten Bogor*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240721134154-20-1123736/ketua-dprd-optimistis-prabowo-wujudkan-pemekaran-kabupaten-bogor>
- Keith Andrew Bettinger. (2014). Puncak Andalas: Functional Regions, Territorial Coalitions, and the Unlikely Story of One Would-be Province. *Indonesia*, 97, 1. <https://doi.org/10.5728/indonesia.97.0001>
- Marfu'ah, sururum. (2017). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 11).
- Marlina, L. (2019). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN BUDGET RATCHETING TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Bukti Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.35308/akbis.v2i2.931>
- Nurdin, I. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press.
- Nurhasanah, A., Juanda, B., & Putri, E. I. K. (2018). ANALISIS KELAYAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM WACANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU BOGOR TIMUR. *TATALOKA*, 20(3), 282. <https://doi.org/10.14710/tataloka.20.3.282-294>
- Simangunsong, F. (2016). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sinen, K., Sasmitha Ningrum, A., & Angela Kabes, O. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(2), 45–54. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i2.20844>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- susanti. (2014). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah*, 3, 249–267.
- Thahir, B. (2019). *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*. Prodi Kebijakan Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan.
- Yonathan, A. z. (2024). *Terbaru, Ini Dia Jumlah Kabupaten di Indonesia Beserta Sebarannya*. <https://goodstats.id/article/terbaru-ini-dia-jumlah-kabupaten-di-indonesia-GYZg7>
- Yudia, R. N., Nurcahya, Y. A., & Atika, A. (2024). Analisis Pertumbuhan Penerimaan PAD Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Magelang. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i3.189>